

**DETERMINAN LUAS PENGUNGKAPAN LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2014-2016**

**[Studi di Wilayah DKI Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota  
Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan,  
Kab. Bekasi, Kota Bekasi)]**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**SHINTA DHIYANTIPUTRI**

**NIM. 12030114140163**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2018**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Shinta Dhiyantiputri

Nomor Induk Mahasiswa : 12030114140163

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **DETERMINAN LUAS  
PENGUNGKAPAN LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2014-2016 [Studi di Wilayah  
DKI Jakarta, Kab. Bogor, Kota  
Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang,  
Kota Tangerang, Kota Tangerang  
Selatan, Kab. Bekasi, Kota Bekasi]**

Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, SE., M.Si., Ak., CA.

Semarang, 24 Januari 2018

Dosen Pembimbing



(Dr. Haryanto, SE., M.Si., Ak., CA.)

NIP. 19741222 200012 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Shinta Dhiyantiputri  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114140163  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **DETERMINAN LUAS PENGUNGKAPAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN  
2014-2016 [Studi di Wilayah DKI Jakarta,  
Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab.  
Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang  
Selatan, Kab. Bekasi, Kota Bekasi]**

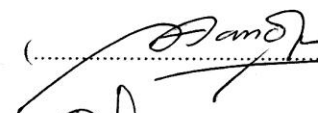
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 Februari 2018

Tim Penguji

1. Dr. Haryanto, SE., M.Si., Ak., CA

(.....)

2. Dr. Rr. Sri Handayani., M.Si., Ak

(.....)

3. Siti Mutmainah., M.Si., Ak

(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Shinta Dhiyantiputri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **DETERMINAN LUAS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2016 [Studi di Wilayah DKI Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, Kota Bekasi]** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 24 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



Shinta Dhiyantiputri

NIM 12030114140163

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Akal budi dan pengetahuan adalah laksana raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa menjadi kosong belaka kecuali hanya berupa angin hampa. Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tulang tanpa perasaan.”

(Kahlil Gibran)

*“Education never ends, Watson. It is a series of lessons with the greatest for the last.”*

(Sherlock Holmes, The Red Circle)

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk Ibuku, Ayahku, Tanteuku, Eyangku (Alm.),

Kakakku, Keluargaku, Sahabat-sahabatku.

## **ABSTRACT**

*This aims of this study is to analyze factors that affect disclosure level of Local Government Financial Report (LGFR) based on Government Accounting Standard. There are 6 (six) independent variables that affect disclosure level of LGFR as dependent variable. There are wealth, dependency of local government, population, number of functional differentiation (OPD), audit findings and level of financial irregularities.*

*Population of this study are Local Government Financial Report (LGFR) in regency/city in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi 2014-2016. This study uses secondary data by using purposive sampling method. There are 27 LGFR that meet the criteria of the study sample. Analysis method in this research is Panel Data Regression using Eviews 8.0 software.*

*The results of this study showed that the variables of wealth and population has significantly positive effect on the disclosure level of LGFR. The level of financial irregularities has significantly negative effect on the disclosure level of LGFR. While, the other variables such as dependency of local government, number of functional differentiation (OPD), and audit findings has no significant effect on the disclosure level.*

**Keywords:** *disclosure level of LGFR, local wealth, dependency of local government, population, number of functional differentiation, audit findings, level of financial irregularities.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan luas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Terdapat 6 (enam) variabel independen yang memengaruhi tingkat LKPD sebagai variabel dependen yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah OPD, jumlah temuan audit BPK dan tingkat penyimpangan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh LKPD Kabupaten/Kota DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode *purposive sampling*. Terdapat 27 LKPD yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel menggunakan software Eviews 9.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel tingkat penyimpangan berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan variabel tingkat ketergantungan, jumlah OPD dan jumlah temuan audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Kata kunci:** luas pengungkapan laporan keuangan, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah OPD, jumlah temuan audit, tingkat penyimpangan

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah robbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurah kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Determinan Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016” dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari tanpa adanya doa, bimbingan, dukungan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan, pengarahan dengan penuh kesabaran dan senantiasa memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr Dwi Ratmono S.E., M.Si selaku dosen wali yang selalu memberikan dorongan dan masukannya.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Kedua orang tuaku, Papa, Johanes Basuki dan Mama, Dewi Prihadiyanti atas doa dan dukungan yang diberikan untuk memotivasi penulis.
7. Tante dan Eyang tercinta, Ika Moerihadi dan Niniek Moerihadi (Alm) yang selalu memberikan doa dan menjadi rumah yang nyaman untuk pulang.  
*Thankyou for everything.*
8. Kakakku, Pritha Ayodya, Ugroseno Bagaskoro dan Nova Dhana Santosa, yang telah menjadi tempat terbaik untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberi semangat untuk menghadapi masalah yang ada.
9. Sebastianus Devy Widhianto, yang selalu menjadi pendamping penulis dalam keadaan apapun, sedih maupun senang. Terimakasih atas waktu yang diberikan selama ini, doaku selalu menyertaimu.
10. *Sisters From Another Mother* : Nadya Michelle dan Nova Natassya atas waktu, motivasi dan dukungan, keceriaan sejak di bangku sekolah hingga saat ini. Semoga persahabatan kita tidak lekang oleh waktu.
11. Sahabat-sahabat karaoke, Hasya, Alia, Yoedith, Theresa, Raisyuli, terimakasih untuk persahabatan dan canda tawa sejak kebersamaan pada awal kuliah sampai sekarang. Semoga persahabatan kita ini akan terus berlanjut.
12. Teman-temanku, Manda, Claudy, Putri, Ica, Abin, Lydia, Tungs, dan Diaz terima kasih untuk persahabatan, waktu, dan semangat yang tak pernah lelah diberikan untuk penulis.
13. Keluarga BOD ECOFINSC 2017, Sebas, Setyo, Miranti, Ine, Cholida, Vivi dan Shintya. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis yang selalu memberikan keceriaan dan semangat.

14. SUPER PROJECT 2017 : Paris, Mayuri, Ipeh, Iqbal, Novi, Tarisa, Surya, Bayu, Falih, Anisa, Fadhly dan Fatkhi. Terima kasih telah menjadi partner seperjuangan yang luar biasa selama 1 tahun kepengurusan ECOFINSC.
15. Kakak-kakakku, Suci Jumadi dan Imam Syahreza. Terima kasih atas kepedulian yang senantiasa diberikan untuk penulis.
16. Successor 2016 : Adit, Miranti, Cholida, Vivi, Sebas, Adi, Inggid, Erdina, Burhan, Mba Nopi, Mba Uzi dan Mas Anwar yang telah memberikan doa dan dukungan. Terimakasih atas ilmu dan pelajaran yang berarti untuk berkembang lebih baik lagi.
17. Keluarga besar ECOFINSC periode 2017. Terima kasih atas waktu, loyalitas, keikhlasan, dan ilmu yang kalian berikan. Semoga kalian sukses selalu.
18. Teman-teman KKN Undip tahun 2014, Desa Triharjo, Kabupaten Kendal: Ivan, Ika, Arni, Vita, Ica dan Hasbi. Terimakasih atas doa dan dukungan serta kebersamaan selama 42 hari.
19. Teman teman bimbingan Bapak Haryanto, Lydia, Saputri, Mutiara, Citra dan Dienti yang selalu membantu dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
20. Seluruh teman-teman Akuntansi 2014 untuk persahabatan selama ini.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 24 Januari 2018

Penulis

Shinta Dhiyantiputri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2 Manfaat penelitian .....	12
1.4 Sistematika penulisan .....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Stakeholder.....	15
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i> .....	18
2.1.3 Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	23
2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	27
2.1.6 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
2.1.7 Karakteristik Pemerintah Daerah .....	32
2.1.7.1 Kekayaan Daerah .....	33
2.1.7.2 Tingkat Ketergantungan.....	34
2.1.8 Kompleksitas Pemerintahan.....	35
2.1.8.1 Jumlah Penduduk .....	35
2.1.8.2 Jumlah OPD .....	36

2.1.9 Hasil Audit .....	37
2.1.9.1 Jumlah Temuan Audit.....	39
2.1.9.2 Tingkat Penyimpangan .....	41
2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
2.3 Kerangka Pemikiran.....	47
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian .....	49
2.4.1 Karakteristik Pemerintahan Daerah .....	49
2.4.1.1 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	49
2.4.1.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	50
2.4.2 Kompleksitas Pemerintahan.....	51
2.4.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	51
2.4.2.2 Pengaruh Jumlah OPD terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	52
2.4.3 Kualitas Hasil Audit.....	54
2.4.3.1 Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	54
2.4.3.2 Pengaruh Tingkat Penyimpangan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	57
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	57
3.1.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen).....	58
3.1.2 Variabel Bebas (Variabel Independen).....	60
3.1.2.1 Kekayaan Daerah .....	60
3.1.2.2 Tingkat Ketergantungan.....	61
3.1.2.3 Jumlah Penduduk .....	62
3.1.2.4 Jumlah OPD .....	63
3.1.2.5 Jumlah Temuan Audit.....	63
3.1.2.6 Tingkat Penyimpangan .....	64
3.2 Populasi dan Sampel .....	65
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	66
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	67
3.5 Metode Analisis Data.....	67
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif .....	68
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	69

3.5.2.1 Uji Normalitas.....	70
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	71
3.5.2.3 Uji Heterokesdastisitas.....	72
3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	73
3.5.3 Pengujian Hipotesis .....	73
3.5.3.1 Uji Statistik F.....	74
3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi .....	75
3.5.3.3 Uji Statistik T.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	76
4.2 Analisis Data.....	78
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	78
4.2.1.1 Variabel Dependen.....	79
4.2.1.2 Variabel Independen .....	80
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	83
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	83
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas.....	84
4.2.2.3 Uji Heterokesdastisitas.....	85
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	87
4.2.3 Uji Hipotesis .....	88
4.2.3.1 Uji Statistik F.....	90
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi .....	91
4.2.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	91
4.2.4.1.1 Hasil Uji Hipotesis 1 .....	93
4.2.4.1.2 Hasil Uji Hipotesis 2.....	93
4.2.4.1.3 Hasil Uji Hipotesis 3.....	93
4.2.4.1.4 Hasil Uji Hipotesis 4.....	94
4.2.4.1.5 Hasil Uji Hipotesis 5.....	94
4.2.4.1.6 Hasil Uji Hipotesis 6.....	95
4.3 Interpretasi Hasil.....	95
4.3.1 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	96
4.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	97
4.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	99

4.3.4 Pengaruh Jumlah OPD terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	100
4.3.5 Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	101
4.3.6 Pengaruh Tingkat Penyimpangan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	103
BAB V PENUTUP .....	105
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	106
5.3 Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN.....	112

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).....	30
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Independen dan Variabel Dependen .....	58
Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel .....	77
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen .....	78
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Dependen .....	78
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	83
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	85
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....	87
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi dengan <i>Fixed Effect</i> .....	89
Tabel 4.9 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	90
Tabel 4.10 Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	92
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	95

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokesdastisitas .....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN I .....	112
LAMPIRAN II .....	116
LAMPIRAN III .....	118

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah di Indonesia memberikan tuntutan yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang telah memenuhi prinsip-prinsip dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini dibuktikan dari pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Prinsip pelaporan keuangan yang diatur dalam SAP salah satunya adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*), dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan pada lembar muka ataupun pada Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila laporan keuangan tidak mengikuti SAP, maka laporan keuangan tersebut menjadi kurang berkualitas, sehingga dapat terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan pembaca laporan serta tidak memiliki daya banding (*comparability*)

kinerja antar kurun waktu dan dengan pemerintah daerah lainnya. Lesmana (2010) menyatakan bahwa kualitas, manfaat dan kemampuan laporan keuangan dapat digambarkan dari kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku telah memenuhi kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan.

Menurut Sinaga (2011), isu mengenai transparansi di Indonesia semakin meningkat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan pejabat publik untuk menjadi lebih transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan krisis ekonomi yang menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu adanya otonomi daerah menyebabkan perubahan dalam pengeluaran pemerintah pusat dan daerah (Mulyana, 2006). Beberapa temuan empiris menunjukkan pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan pengungkapan yang diwajibkan oleh SAP, dimana luas pengungkapan LKPD tahun 2006 sampai tahun 2009 hanya sebanyak 44,56% (Hilmi, 2010) sedangkan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan penting terutama bagi masyarakat dimana sumber dana yang digunakan dalam rangka pemberian pelayanan publik sebagian besar berasal dari masyarakat melalui pembayaran pajak (Mardiasmo, 2004).

Rendahnya luas pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan kelemahan akuntabilitas. Akuntabilitas yang lemah mengindikasikan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,

contohnya korupsi. Hal ini dikarenakan kewenangan daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangannya semakin luas berdasarkan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sementara campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah semakin kecil (Ratnasari, 2016). Oleh karena itu, penerapan *reward and punishment* perlu dilakukan secara tegas supaya pemerintah daerah taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memenuhi pertanggungjawabannya adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholders*). Pemangku kepentingan yang utama adalah masyarakat dan dewan legislatif daerah (DPRD). Permasalahan yang muncul apabila pemerintah tidak mampu menyajikan informasi secara relevan, handal, sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya. Oleh karena itu, auditor memiliki fungsi untuk memberikan jaminan bahwa laporan yang dibuat pemerintah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAP sebelum disampaikan kepada DPRD dan masyarakat.

Kecenderungan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi pada laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir meningkat (Hilmi, 2010; Lesmana, 2010; Syafitri, 2012; Khasanah, 2014 dan Ratnasari, 2016). Peningkatan pengungkapan informasi pada laporan keuangan dikarenakan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP) menyatakan bahwa informasi yang wajib disediakan oleh pejabat publik salah satunya laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan tahunan, laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diaudit sehingga pemerintah memiliki kesadaran dalam melakukan transparansi dan pertanggungjawaban sosial (Pratama dkk., 2015 dalam Ratnasari, 2016). Hal tersebut menyebabkan masyarakat sebagai *principal* menuntut pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan manajer sebagai *steward* tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi lebih mengutamakan keinginan prinsipal. Berbeda dengan teori agensi, pemerintah sebagai *steward* akan mengutamakan kepentingan organisasi (*pro-organizational*) daripada kepentingan individu (*self serving*) untuk berperilaku kooperatif. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh *stakeholder* organisasi tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban dibanding wujud pemenuhan tuntutan (Sinaga, 2011). Hal ini pun bisa menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk mencapai tujuan politik dengan harapan akan terpilih kembali pada pemilu periode selanjutnya melalui kepercayaan publik.

Karakteristik pemerintah daerah mengandung arti sifat khas dari otoritas administratif pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota (Lesmana, 2010). Choiriyah (2010) dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menyatakan

bahwa karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan maka pernyataan tersebut dapat diterapkan dalam suatu daerah. Sehingga karakteristik pemerintah daerah diharapkan dapat menjelaskan kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya memproksikan karakteristik pemerintah daerah dengan kekayaan daerah, ukuran hutang, pendapatan transfer, rasio kemandirian dan total aset (Laswad, 2005; Liestiani, 2008; Lesmana, 2010 dan Hilmi, 2010). Dengan kata lain, variabel-variabel yang diproksikan oleh karakteristik pemerintah daerah termasuk sebagai informasi finansial dalam laporan keuangan.

Peneliti menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai salah satu determinan luas pengungkapan wajib LKPD dengan alasan karakteristik pemerintah daerah menghasilkan informasi finansial yang mencerminkan kondisi ekonomi suatu pemerintahan melalui laporan keuangan. Pada dasarnya, sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak yang dibebankan pada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan publik. Sehingga penyajian laporan keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan diharapkan dapat menjadi bukti pertanggungjawaban (akuntabilitas) serta mengurangi asimetri informasi antara pihak pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal* (Mardiasmo, 2004).

Kompleksitas pemerintahan mengandung arti sebagai suatu kondisi yang terdapat berbagai macam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang memengaruhi sistem pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung

(Khasanah, 2014). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pemerintahan, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan ekonomi saja, tetapi ada keputusan politik dan sosial yang dapat bermanfaat dalam pembuatan keputusan suatu pemerintahan. Penelitian-penelitian sebelumnya memproksikan kompleksitas pemerintah dengan jumlah penduduk dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Liestiani, 2008; Lesmana, 2010; Hilmi, 2010; Syafitri, 2012; dan Khasanah, 2014).

Peneliti menggunakan kompleksitas pemerintah sebagai salah satu determinan luas pengungkapan wajib LKPD dengan alasan kompleksitas pemerintah mencerminkan kondisi yang memengaruhi suatu pemerintahan. Jumlah penduduk yang besar pada suatu pemerintahan berarti bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang lebih kepada masyarakatnya. Jumlah urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dapat menggambarkan kompleksitas suatu pemerintahan. Sehingga dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar untuk membantu pembaca laporan keuangan untuk memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan pemerintah (Hilmi, 2010). Dengan demikian, penyajian laporan keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan diharapkan dapat menjadi bukti pertanggungjawaban (akuntabilitas) serta mengurangi asimetri informasi antara pihak pemerintah dan perangkat daerah sebagai *steward* serta masyarakat sebagai *principal* (Mardiasmo, 2004).

Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang bertujuan

untuk memeriksa kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2002). Sehingga, kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah dicerminkan dari hasil pemeriksaan audit oleh auditor sektor pemerintahan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (Kawedar, Rohman & Handayani, 2008). Berdasarkan penelitian sebelumnya, hasil audit diproksikan dengan temuan audit dan tingkat penyimpangan (Hilmi, 2010; Liestiani, 2008; Khasanah, 2014).

Peneliti menggunakan hasil audit sebagai salah satu determinan luas pengungkapan wajib LKPD dengan alasan audit berfungsi untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dapat dibuktikan keandalan dan kelayakannya (Ulum, 2009). Dengan demikian, BPK dapat memberikan pendapat mengenai wajar tidaknya laporan tersebut. BPK berhak menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya terkait dengan temuan-temuan audit berdasarkan pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas publik pemerintah daerah kepada BPK sebagai *stakeholder* yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

Beberapa penelitian membahas mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah dan hasil audit terhadap luas pengungkapan dalam LKPD. Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada karakteristik pemerintahan daerah (Lesmana, 2010; Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011; Syafitri, 2012) sehingga peneliti mereplikasi penelitian Hilmi (2010). Hal ini dikarenakan penelitian Hilmi (2010) tidak hanya

menggunakan variabel karakteristik daerah, tetapi menambahkan variabel-variabel lain yang digambarkan melalui kompleksitas pemerintah daerah dan hasil audit sehingga penelitian ini telah mencakup variabel-variabel yang lebih beragam dan komprehensif dari penelitian sebelumnya. Variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik pemerintah daerah terdiri dari variabel kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahan terdiri dari variabel jumlah penduduk dan jumlah OPD, serta hasil audit terdiri dari variabel jumlah temuan audit dan tingkat penyimpangan.

Kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan LKPD. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Laswad (2005), Liestiani (2008) dan Hilmi (2010). Variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam penelitian Hilmi (2010) tidak berpengaruh pada luas pengungkapan wajib LKPD. Berbeda dengan hasil penelitian Syafitri (2012) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan wajib dalam LKPD.

Hilmi (2010) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memengaruhi luas pengungkapan wajib LKPD secara positif dan signifikan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Liestiani (2008). Variabel jumlah OPD dinyatakan oleh Hilmi (2010), Lesmana (2010) dan Syafitri (2012) tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib LKPD. Hasil tersebut tidak didukung oleh penelitian Khasanah (2014) yang menyatakan bahwa jumlah OPD memengaruhi luas pengungkapan wajib LKPD secara negatif dan signifikan.

Jumlah temuan audit tidak memengaruhi luas pengungkapan wajib dalam LKPD (Hilmi, 2010). Hasil tersebut tidak didukung oleh penelitian Liestiani (2008) yang menyatakan bahwa jumlah temuan audit memengaruhi luas pengungkapan wajib dalam LKPD secara positif dan signifikan. Sedangkan tingkat penyimpangan memiliki hasil positif signifikan terhadap luas pengungkapan wajib dalam LKPD (Hilmi, 2010).

Penelitian terdahulu terkait dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah belum banyak dilakukan daripada laporan keuangan perusahaan. Selain itu, Hilmi (2010) menduga motif yang mendasari pengungkapan cenderung sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) sehingga akan lebih mengukur ketaatan dibandingkan pengungkapan. Peneliti tertarik untuk mengambil tema penelitian tentang pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah karena sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan karena pada praktiknya terdapat keterbatasan informasi dan data dari pemerintah yang dapat diakses masyarakat secara bebas (Asyrofi, 2016). Dengan demikian, mengingat tuntutan *good governance* yang berasal dari pihak pemangku kepentingan terutama masyarakat meingkat, maka penelitian tentang pengungkapan informasi atas laporan keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan rata-rata luas pengungkapan pemerintah daerah masih terbilang rendah yaitu 22% (Lesmana, 2010); 35,45% (Liestiani, 2008); 44,56% (Hilmi, 2010); 52,09% (Syafitri, 2012) dan 59,99% (Khasanah, 2014).

Penelitian ini menggunakan basis akuntansi yang digunakan sebagai pengukuran kepatuhan pengungkapan LKPD yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu berbasis akrual secara penuh sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual. Hal ini dikarenakan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun sejak diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010.

Peneliti menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah Jabodetabek karena masih belum ada penelitian yang fokus pada lingkup wilayah yang sempit. Alasan dipilihnya sampel penelitian pada wilayah tersebut adalah wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, dimana hal tersebut juga berdampak pada kebutuhan sumber dana yang besar untuk mendanai kewenangannya dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Wilayah lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi juga digunakan sebagai sampel untuk melihat perbandingan hasil pada masing-masing wilayah yang berdekatan dengan Kota DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian tentang determinan luas pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah daerah menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Determinan Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016 [Studi di**

**Wilayah Jabodetabek (Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, Kota Bekasi)]”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Kualitas, manfaat dan kemampuan laporan keuangan dapat digambarkan dari kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku telah memenuhi kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai determinan luas pengungkapan LKPD menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif atau negatif terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-2016?
2. Apakah kompleksitas pemerintahan yang diproksikan dengan jumlah penduduk dan jumlah OPD berpengaruh positif atau negatif terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-2016?
3. Apakah hasil audit yang diproksikan dengan jumlah temuan audit dan tingkat penyimpangan berpengaruh positif atau negatif terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-2016?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mendeteksi apakah karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-2016.
2. Mendeteksi apakah kompleksitas pemerintahan yang diproksikan dengan jumlah penduduk dan jumlah OPD berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-2016.
3. Mendeteksi apakah hasil audit yang diproksikan dengan jumlah temuan audit dan tingkat penyimpangan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-2016.

#### **1.3.2 Manfaat penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat menjadi gambaran tentang pentingnya kualitas laporan keuangan terutama dalam hal pengungkapan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan.

3. Bagi Pemerintah Pusat, dapat menjadi acuan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam LKPD.
4. Bagi kalangan akademis dan pihak-pihak terkait lainnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, dapat dijadikan referensi serta bahan kajian teoritis.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini ditulis dengan 5 bab utama yang dibagi kedalam beberapa sub bab.

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melatar belakangi penelitian dilakukan, yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan, penentuan sampel, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan hasil deskripsi uji penelitian, analisis data dan interpretasi hasil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan LKPD.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.